

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 1983. *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Alumni.
- B.F. Sihombing. 2004. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Bambang Eko Supriyadi. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 2003 *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Effendi Perangin. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- John Salindeho. 1988. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Yogyakarta: Citra Media.
- Muhammad Yasmin Lubis. 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
- Ridwan Halim. 1985. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin Soedharyo. 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

## **Jurnal**

Budi Irawan. "Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi di Kabupaten Cilacap)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol.1 No.2. 2015.

Hery Zarkasih. "Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)". *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*. Vol.3 No.8. 2015.

Jafar Mukhlis dan Sugiono Soetomo. "Analisis Pengaruh Exit Toll Terhadap Tata Guna Lahan di Kabupaten Brebes". *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol.13 No.3. 2017.

Jarot Widya Muliawan. "Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 In The Land Acquisition". *Jurnal Hukum Peratun*. Vol.1 No.2. 2018.

Mukmin Zakie. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)". *Jurnal Hukum*. Vol.18 No.Edisi Khusus. 2011.

Muwahid. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol.7 No.1. 2017.

Rahayu Subekti. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.2. 2016.

Sumaryoto. "Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya". *Jurnal Pedesaan dan Pembangunan*. Vol.1 No.2. 2010.

Urip Santoso. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*. Vol.21 No.3. 2016.

Widyarini Indriasti Wardani. “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.10 No.2. 2013.

Yanto Sufriadi. “Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. *Jurnal Hukum*. Vol.18 No.1. 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Gubernur Nomor 620/8 Tahun 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah